

**ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH**

Lucy Auditya

Program Magister Akuntansi Universitas Bengkulu

Husaini

Lismawati

Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu

ABSTRACT

This study aims to prove the influence of accountability and transparency in the financial management of the performance of the local government area of the province of Bengkulu. This study used a questionnaire to collect the data, the sampling method used in this research is purposive sampling with sample criteria, namely Echelon III and Echelon IV, section Accounting or Section Bookkeeping on each Unit (SKPD) in the government of Bengkulu province.

The results showed that the accountability of financial management and significant positive effect on the performance of the local government of Bengkulu province. This means that the higher accountability in financial management will be able to improve the performance of the local government of Bengkulu province. Similarly, the transparency of financial management, positive and significant effect on the performance of local government. In this case, the higher level of transparency in the financial management of local government performance will also be better. By increasing accountability and transparency in the financial management of all existing units expected to improve the performance of local governments in order to promote the establishment of good governance.

Keywords: Accountability, Transparency, Financial Management, Performance of local government.

1. PENDAHULUAN

Isu tentang kinerja pemerintah daerah dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Mahsun (2006:4) mengatakan bahwa kinerja itu sendiri adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Tuntutan akan kinerja yang baik ini terjadi hampir di semua pemerintahan seiring dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pemerintahan termasuk juga di Provinsi Bengkulu.

Pemerintah Provinsi Bengkulu juga merupakan salah satu pemerintahan yang menjadi sorotan publik seiring dengan proses pembangunan yang dilakukan. Tahun 2013 ini Provinsi

Bengkulu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa Laporan Keuangan Pemerintahan. Opini BPK ini merupakan salah satu ukuran kinerja dalam bidang pengelolaan keuangan, sehingga dapat dikatakan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Bengkulu sudah baik. Di sisi lain, berdasarkan hasil survey Lembaga Kemitraan *Partnership for Governance Reform* terkait dengan tata kelola pemerintahan (*Indonesia Governance Index*) tahun 2012, Provinsi Bengkulu adalah urutan ke 3 (tiga) terburuk atau terendah se Indonesia dalam tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan di Provinsi Bengkulu berada pada angka 4,77% yang masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 5,60%. Hasil survey tersebut mengatakan bahwa hal ini terjadi karena partisipasi, keadilan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas di empat sektor yaitu pemerintahan, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi masih sangat rendah (Harian Rakyat Bengkulu, Mei 2013). Hal ini mengindikasikan pemerintah Provinsi Bengkulu selama ini belum menerapkan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan pemerintahan. Fenomena inilah yang menarik untuk diteliti lebih jauh tentang kondisi yang ada yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari *Good Governance*.

Wiranto (2012:1) mengatakan bahwa *Good Governance* dapat dipahami sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam proses manajemen berbagai urusan publik pada berbagai level dalam suatu negara. *Good Governance* memiliki beberapa indikator seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum. Dari semua indikator tersebut, hal yang paling penting dalam *Good Governance* adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik. Mardiasmo (2006) mengatakan bahwa karakteristik pelaksanaan *Good Governance* meliputi antara lain *transparency*, *responsiveness*, *consensus orientation*, *equity*, *efficiency* dan *effectiveness*, serta *accountability*. Dari karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu terwujudnya transparansi, *value for money*, dan akuntabilitas.

Mardiasmo (2006) mengatakan bahwa dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan *Good Governance* yaitu: (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki *internal rules* dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah. Akbar (2012) mengatakan bahwa era reformasi membawa dampak terhadap tuntutan adanya akuntabilitas (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*) dalam proses pembangunan manajemen pemerintahan di Indonesia. Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kedua hal tersebut menjadi suatu konsekuensi logis dalam penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang *participative*.

Pengukuran kinerja instansi pemerintah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu melihat kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri, dan melihat kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan (Mardiasmo, 2006). Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait

dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Banyak penelitian dan pendapat yang mengatakan bahwa terdapat kaitan penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik. Rahmanurrajiid (2008:146-147) mengatakan penerapan azas akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengharuskan pemerintah memberikan pertanggungjawaban dan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan sehingga pemerintah berusaha untuk memberikan yang terbaik (kinerja terbaik) kepada masyarakat. Ismiarti (2013:90-91) menghasilkan temuan bahwa implementasi akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah mampu meningkatkan kinerja. Werimon, Simson, Imam Ghozali, & M. Nasir (2007) mengatakan bahwa implementasi akuntabilitas dan transparansi menyebabkan kontrol yang besar dari masyarakat menyebabkan pengelola pemerintahan akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, dan pada akhirnya akan mampu menghasilkan kinerja pemerintahan dengan baik.

Berbagai argumen di atas memberikan pemahaman betapa pentingnya penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam peningkatan kinerja pemerintahan. Penelitian ini akan menganalisis implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu yang akan dilihat adalah kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada. Penelitian ini mereplikasi penelitian Ismiarti (2013) yang melihat konsep akuntabilitas dan transparansi pada Kecamatan di Kota Bengkulu yang dikaitkan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kinerja. Penelitian ini juga melihat implementasi akuntabilitas dan transparansi tetapi pada pengelolaan keuangan yang dikaitkan dengan kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu karena isu ini sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi di pemerintah Provinsi Bengkulu terkait dengan *Good Governance* seperti yang diuraikan di atas.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah? 2. Apakah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris: 1. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 2. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja

2.1.1 Konsep Kinerja

Menurut Mahsun (2006:4) kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi (Bastian, 2010:274). Dalam PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 35 menyatakan kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan 2 pendekatan. Pertama, melihat kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri. Kedua, melihat kinerja organisasi publik dari persepektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Kedua perspektif tersebut saling berinteraksi di antara keduanya, karena pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik sangat terkait erat dengan lingkungan tempat organisasi publik hidup dan berkembang. Khusus mengenai organisasi

publik berkaitan erat dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan. Konsep yang sering dipergunakan untuk melihat kinerja organisasi publik daerah sering dikaitkan dengan penggunaan anggaran. Konsep ini sering dikenal dengan istilah *performance in term of the monetary calculus of efficiency* (Mardiasmo, 2006:5)

2.1.2 Penilaian dan Pengukuran Kinerja

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Permenpan No.25 Tahun 2012, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Dessler (2009:132) mendefinisikan penilaian kinerja sebagai evaluasi kinerja karyawan saat ini/atau dimasa lalu relatif terhadap standar prestasinya. Penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu (karyawan) kepada organisasi tempat mereka bekerja. Model penilaian kinerja yang dicontohkan oleh Dessler (2009:135) meliputi indikator sebagai berikut: 1) Kualitas kerja adalah akurasi, ketelitian, dan bisa diterima atas pekerjaan yang dilakukan; 2) Produktivitas adalah kuantitas dan efisiensi kerja yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu; 3) Pengetahuan pekerjaan adalah keterampilan dan informasi praktis/teknis yang digunakan pada pekerjaan.; 4) Bisa diandalkan adalah sejauh mana seorang karyawan bisa diandalkan atas penyelesaian dan tindak lanjut tugas; 5) Kehadiran adalah sejauh mana karyawan tepat waktu, mengamati periode istirahat/makan yang ditentukan dan catatan kehadiran secara keseluruhan; dan 6) Kemandirian adalah sejauh mana pekerjaan yang dilakukan dengan atau tanpa pengawasan.

Mahsun (2006:2) mengatakan penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut: 1) biaya pelayanan (*cost of service*); 2) penggunaan (*utilization*); 3) kualitas dan standar pelayanan (*quality and standards*); 4) cakupan pelayanan (*coverage*); dan 5) kepuasan (*satisfaction*).

2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja Instansi Pemerintah adalah “gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan” (MenPAN:2007).

Banyak pendapat para ahli terkait dengan kinerja pemerintah daerah, baik dari sisi definisi, pengukuran, indikator, dan evaluasi kinerja. Setelah suatu sistem pengelolaan keuangan terbentuk, perlu disiapkan suatu alat untuk mengukur kinerja dan mengendalikan pemerintahan agar tidak terjadi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), tidak adanya kepastian hukum dan stabilitas politik, dan ketidakjelasan arah dan kebijakan pembangunan. Pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang di dalam terdapat indikator kinerja dan target kinerja. Pelaporan kinerja, dan mekanisme *reward and punishment*. Indikator pengukuran kinerja yang baik mempunyai karakteristik *relevant, unambiguous, cost-effective, dan simple*, serta berfungsi sebagai sinyal yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut (Sumarsono, 2010: 84).

2.2 Akuntabilitas

2.2.1 Konsep Akuntabilitas.

Akbar (2012) mengatakan bahwa Akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban, namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata *accountability* itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen. Lebih lanjut dikatakan bahwa konsep akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Stewart tentang jenjang atau tangga akuntabilitas yang terdiri dari 5 (lima) jenis tangga akuntabilitas yakni: 1) *accountability for probity and legality*; 2) *process Accountability*; 3) *performance Accountability*; 4) *programme Accountability*; dan 5) *policy Accountability*.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Ismiarti, 2013:30). Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999 dalam Mardiasmo, 2006:4). Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Annisaningrum (2010:1) mengatakan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut: 1) pertanggungjawaban dana publik; 2) penyajian tepat waktu; dan 3) adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Krina, 2003 dalam Rahmanurrajiid, 2008:85-86).

2.2.2 Indikator Akuntabilitas

Dari konsep-konsep akuntabilitas tersebut di atas, dapat diklasifikasikan beberapa indikator akuntabilitas yaitu:

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, meliputi: pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan; pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku; adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku; adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi; konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, meliputi: penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal; akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program; akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat; dan ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

2.2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Implikasinya, kini keduanya menjadi bahasan yang marak dan *interchangable*, penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang *participative* sebagai suatu konsekuensi logis (Akbar, 2012:2). Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.

2.3 Transparansi

2.3.1 Konsep Transparansi

Coryanata (2007) mengatakan transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: 1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran; 2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; 3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; 4) terakomodasinya suara/usulan rakyat; dan 5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Annisaningrum (2010:2), transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria: adanya pertanggungjawaban terbuka; adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan; adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Dalam hal pelaksanaan transparansi pemerintah, media massa mempunyai peranan yang sangat penting, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai penonton atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi. Untuk melaksanakan itu semua, media membutuhkan kebebasan pers sehingga dengan adanya kebebasan pers maka pihak media akan terbebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis (Wiranto, 2012). Dengan adanya keterbukaan ini, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol yang berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pemerintah harus pandai memilah mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu akan diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi menjadi konsumsi publik. Ada hal-hal yang menyebabkan informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik.

2.3.2 Prinsip-prinsip Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Pasaribu (2011) mengatakan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh

masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2007:8) meliputi 2 aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Werimon (2007:8) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari: 1) adanya sistem pelaporan keuangan; 2) adanya sistem pengukuran kinerja; 3) dilakukannya auditing sektor publik; dan 4) berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*). Lebih lanjut dikatakan anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: 1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran, 2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, 3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, 4) terakomodasinya suara/usulan rakyat, 5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Asumsinya semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBN maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut; (1) publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (2) publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya, (3) publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah, (4) transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga, (5) kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Rahmanurrajjid, 2008:86).

2.3.3 Indikator Transparansi

Menurut Krina (2003) dalam Rahmanurrajjid (2008:87-88) prinsip transparansi di atas dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti: 1) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik; 2) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik; 3) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

2.3.4 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam ranah keuangan publik, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Mardiasmo (2004:30) mengatakan transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Manajemen kinerja yang baik adalah merupakan titik awal dari transparansi, untuk mencapai hal tersebut pemerintah harus menangani dengan baik kinerjanya dengan memperhatikan 2 aspek transparansi, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi harus seimbang, juga menyangkut kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu.

2.4 Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis

Makna dari akuntabilitas dapat dilihat dalam dua hal yaitu: salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan program/kegiatan dan anggaran. Implementasi akuntabilitas diyakini akan mampu meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan (Rubin, 1996 dalam Werimon, 2007:7). Akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisiensi dari para aparat birokrasi sehingga tujuan akan mampu dicapai. Akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Rahmanurrajjid, 2008:80).

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja. Konsep ini menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan pemerintahan (kinerjanya) harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik (Halim, 2002: 83).

Suparno (2012:5) melakukan penelitian tentang akuntabilitas keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa secara simultan akuntabilitas keuangan daerah, kejujuran, transparansi, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan secara parsial akuntabilitas keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pasaribu (2011:6) melakukan penelitian tentang pengaruh penyajian laporan keuangan SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD, secara parsial menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan SKPD. Coryanata (2007) melakukan pengujian tentang pengetahuan dewan terhadap anggaran jika dipengaruhi dengan adanya partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan publik secara signifikan, artinya telah terjadi peningkatan kinerja pengetahuan dewan sehingga kinerja pengawasannya juga baik yang akhirnya akan meningkatkan kinerja pemerintahan.

Nuraini, dkk (2012:57-58) melakukan penelitian tentang model pengelolaan keuangan instansi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara di Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PNJ telah menyajikan Laporan Keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya PNJ telah menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nasution (2009:52) melakukan penelitian tentang pengaruh penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. Hasilnya menunjukkan secara parsial dan simultan Penyajian Neraca SKPD (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Mulyana (2006) dalam Pasaribu (2011:19) juga menyebutkan bahwa penyajian neraca daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan secara langsung mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Garini (2011:131) melakukan penelitian tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas di Kota Bandung. Hasilnya menunjukkan secara simultan dan parsial akuntabilitas memberikan kontribusi atau pengaruh positif terhadap kinerja dinas di kota Bandung. Garnita (2008:82) melakukan penelitian tentang Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas adalah memberikan pertanggungjawaban kepada publik terkait pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang telah dilakukan. Akuntabilitas sendiri adalah amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan pemerintahan, maka hal ini menjadi kewajiban bagi pelaksana pemerintahan. Penilaian terhadap pertanggungjawaban tersebut akan dilakukan oleh publik dan institusi pengawasan yang mempunyai konsekuensi hukum, maka aparaturnya pelaksana pemerintahan akan berupaya menerapkan konsep akuntabilitas tersebut dalam pengelolaan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan. Penerapan akuntabilitas dengan berbagai indikatornya ini dalam pengelolaan keuangan secara langsung akan meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat dirumuskan hipotesis yang akan diajukan adalah:

H1: Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

2.4.1 Transparansi dan Kinerja Pemerintah

Rubin (1996) dalam Werimon, dkk (2007:7) mengatakan bahwa makna dari transparansi dapat dilihat dalam dua hal yaitu: salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Melalui transparansi masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah yang tertuang dalam anggaran daerah. Juga melalui transparansi masyarakat di daerah tersebut dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Werimon, dkk (2007:21-23) mengatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Kontrol yang besar dari masyarakat ini akan menyebabkan pengelola pemerintahan akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, dan pada akhirnya akan mampu menghasilkan kinerja pemerintahan dengan baik dan memihak kepada rakyat.

Pasaribu (2011:6) melakukan penelitian tentang pengaruh penyajian laporan keuangan SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan SKPD, secara parsial menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan SKPD di pemerintahan. Suparno (2012:5) melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa secara simultan menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan secara parsial transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Ratih (2012:6) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah terhadap kinerja SKPD Pada pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah mempunyai pengaruh terhadap kinerja SKPD. Semakin baik pemahaman aparatur pengelola keuangan daerah terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan pengelolaan barang milik daerah akan mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah sekaligus akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Nasution, (2009:52) melakukan penelitian tentang pengaruh penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Hasilnya menunjukkan secara parsial dan simultan penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah yang sekaligus meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Mulyana (2006) dalam Pasaribu (2011:19) juga menyebutkan bahwa penyajian neraca daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan daerah. Penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan daerah. Coryanata (2007) melakukan pengujian tentang tentang pengetahuan dewan terhadap anggaran jika dipengaruhi dengan adanya partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan publik secara signifikan, artinya pengetahuan dewan yang baik tentang anggaran akan mampu

meningkatkan pengawasan keuangan yang dilakukan sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Kondisi yang mengharuskan pemerintah memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan secara tidak langsung pengelola pemerintahan berusaha untuk memberikan yang terbaik (kinerja terbaik) kepada masyarakat dengan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan sesuai dengan visi dan misi (Rahmanurrajjid, 2008:86).

Garini (2011:131) melakukan penelitian tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas di Kota Bandung. Hasilnya menunjukkan secara simultan dan parsial memberikan kontribusi atau pengaruh positif terhadap kinerja dinas di kota Bandung.

Perwujudan transparansi sebagai amanat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pemerintahan telah memberikan tekanan kepada aparatur pengelola pemerintahan untuk membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewajiban aparatur pengelola pemerintahan untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengetahui, memberikan masukan, mengevaluasi dan menilai, sehingga akan menjadikan aparatur lebih bekerja hati-hati sesuai dengan ketentuan yang ada. Secara naluri aparatur juga ingin mendapat penilaian dari publik akan kualitasnya dalam bekerja. Alasan ini akan menjadikan aparatur pemerintah akan menampilkan kinerja terbaiknya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehingga dia akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya kinerja pemerintah daerah juga akan baik. Pengawasan dan penilaian publik akan menjadi tekanan bagi aparatur pemerintah dalam bekerja sehingga akan memperlihatkan kinerjanya dengan bekerja sebaik-baiknya sehingga secara langsung akan meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat dirumuskan hipotesis yang akan diajukan adalah:

H2: Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey. Penelitian kuantitatif dengan metode survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2012:10-11). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpul melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi dan dijawab oleh responden pegawai negeri yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Provinsi Bengkulu. Sedangkan sampel dalam penelitian adalah pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 Bagian Pembukuan atau Bagian Akuntansi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sample*. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 pada semua SKPD Provinsi Bengkulu setingkat Kepala Bidang dan Kepala Sub bidang pada Bagian Pembukuan atau Bagian Akuntansi yang telah menjabat minimal 1 tahun.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

- 1) **Kinerja Pemerintah Daerah:** Kinerja pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di setiap SKPD dalam membuat atau menyusun dan melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan peraturan daerah yang berlaku. Dimensi dari variabel ini adalah 1) kesesuaian dengan standar pengelolaan keuangan, 2) pencapaian target kinerja dari suatu program, 3) pencapaian efisiensi operasional, 4) ketepatan dan kesesuaian hasil, 5) tingkat pencapaian program, 6) dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat, dan 7) moral perilaku pegawai. Instrumen dan pengukuran variabel ini pernah digunakan dan dikembangkan dari (Sri Maryati, 2012; Ismiarti, 2013).
- 2) **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan:** akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini meliputi pertanggungjawaban dalam bentuk pembuatan laporan keuangan yang dibuat dan dilaporkan di setiap SKPD yang ada di pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimensi variabel ini adalah: mekanisme dan aturan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi mekanisme proses penganggaran, mekanisme dalam konsep dan indikator kinerja anggaran, serta standar biaya; mekanisme pertanggungjawaban, pelaporan, dan evaluasi; mekanisme pengendalian; mekanisme pengawasan dan pemeriksaan. Pengukuran variabel ini dikembangkan dari indikator (Krina, 2003 dalam Rahmanurrasjid, 2008; Sande, 2013; dan Ismiarti, 2013).
- 3) **Transparansi Pengelolaan Keuangan:** transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini menyangkut kemampuan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di setiap SKPD yang ada di pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mempublikasi dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang di buatnya kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Dimensi variabel ini adalah: mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik; mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik; dan mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani. Pengukuran variabel ini dikembangkan dari indikator (Krina, 2003 dalam Rahmanurrasjid, 2008; Suparno, 2012; dan Ismiarti, 2013).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner didistribusikan langsung kepada responden dengan harapan untuk memperoleh tingkat pengembalian kuesioner yang tinggi. Setiap responden yang sudah diidentifikasi diberikan kuesioner dan tiga hari kemudian akan dijemput, dengan maksud jika responden memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait kuesioner akan bisa diberikan oleh peneliti.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu ini mencakup: statistik deskriptik, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi masing-masing variabel yang ada. Apakah variabel akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan benar-benar dirasakan oleh

seluruh pegawai dan masyarakat. Analisis statistik deskriptif juga menggambarkan kondisi variabel kinerja pemerintah daerah yang ada, apakah kondisi kinerja tersebut sudah baik dan tinggi atau tidak.

3.5.2 Uji Kualitas Data

Sebelum data penelitian diolah lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan uji terhadap kualitas data yang dihasilkan dari jawaban responden berdasarkan kuesioner yang ada. Uji kualitas data dilakukan untuk memastikan kuesioner yang digunakan benar-benar valid dan reliabel dalam mengukur variabel, dengan cara:

- 1) Uji Validitas; dilakukan untuk menentukan tingkat akurasi data. Uji validitas digunakan untuk menguji instrumen penelitian agar instrumen tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuannya. Uji validitas bertujuan untuk mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner benar benar mengukur apa yang hendak diukur (Ghozali, 2011:52). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien korelasi *pearson correlation*.

Kriteria yang ditetapkan adalah r hitung (koefisien korelasi) lebih besar dari r tabel (nilai kritis) pada taraf signifikansi 0,05. Jika koefisien korelasinya lebih besar dari nilai kritisnya maka instrumen pengukur dapat dikatakan valid.

- 2) Uji Reliabilitas; Uji reliabilitas instrumen penelitian dilaksanakan dengan melihat konsistensi koefisien *Cronbach Alpha* untuk semua variabel. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Ghozali, 2011:47).

Kriteria yang ditetapkan dalam mengetahui data adalah nilai koefisien reliabilitas *alpha* yang lebih besar dari 0,60. Jika nilai koefisien reliabilitas *alphanya* lebih besar dari 0,60 maka instrumen pengukur variabel dapat dikatakan reliable.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan sebanyak tiga macam uji asumsi klasik yaitu uji normalitas data, dan multikolinearitas. Ini dikarenakan pengambilan data pada penelitian ini menggunakan data kuesioner murni.

- 1) Uji Normalitas; adalah untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011:160).
- 2) Uji Multikolinearitas; bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011). Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai *tolerance* serta *variance inflation factor (VIF)*. Multikolinearitas terjadi jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Dan nilai *VIF* lebih besar dari 10, apabila *VIF* kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan objektif.
- 3) Uji Heteroskedastisitas : bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. (Ghozali, 2011 : 139). Untuk melakukan pengujian asumsi ini dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Persamaannya adalah :

$$U_t = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Jika variabel independen signifikan secara statistik tidak mempengaruhi variabel dependen, maka tidak terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat apabila dari probabilitas signifikansi diatas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2011 : 143)

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Dalam menguji hipotesis dikembangkan suatu persamaan untuk menyatakan hubungan antar variabel dependen yaitu Y (dalam hal ini Kinerja Pemerintah Daerah) dengan variabel independen yaitu X_1 (Akuntabilitas pengelolaan keuangan) dan X_2 (Transparansi pengelolaan keuangan). Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda yang diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Kinerja Pemerintah Daerah
- X_1 = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- X_2 = Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
- β_1 = koefisien regresi akuntabilitas
- β_2 = koefisien regresi transparansi
- α = konstanta
- e = error

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi sampel mencocokkan data. Untuk regresi dengan variabel bebas lebih dari dua maka digunakan *adjusted R²* sebagai koefisien determinasi.. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, apabila $R^2 = 0$ berarti tidak ada hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, sedangkan jika $R^2 = 1$ berarti terdapat suatu hubungan yang sempurna.

b. Uji F

Uji ini dilakukan untuk menguji variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti secara bersama-sama variabel X_1 dan X_2 berpengaruh terhadap variabel kinerja pemerintah daerah.
2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara bersama-sama variabel X_1 dan X_2 tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja pemerintah daerah.

c. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel Independent secara individu (*partial*) dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti secara partial variabel X_1 dan X_2 berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara partial variabel X_1 dan X_2 tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Pengembalian Kuisisioner

Dari 82 Kuisisioner yang didistribusikan kepada responden, jumlah kuisisioner yang kembali sebanyak 76 kuisisioner atau sebesar 92,68 % kuisisioner yang kembali. Dari 76 kuisisioner tersebut terdapat 4 kuisisioner atau sebesar 4,88 % yang tidak dapat diolah dikarenakan pengisian jawaban pada kuisisioner tidak tertera secara lengkap dan terdapat jawaban ganda dari responden pada item pertanyaan. Sehingga hanya 72 kuisisioner atau sebesar 87,80 %

yang bisa diolah untuk menjadi data penelitian. Secara jelasnya mengenai deskriptif data penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Deskriptif Pengembalian Kuisisioner

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuisisioner yang didistribusikan	82 Kuisisioner	100
Kuisisioner yang kembali	76 Kuisisioner	92,68
Kuisisioner yang tidak bisa diolah	4 Kuisisioner	4,88
Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian	72 Kuisisioner	87,80

Sumber : Data Primer diolah (2013)

4.2. Profil Responden

Dibawah ini disajikan data tentang karakteristik responden yang terdiri dari jenis kelamin, lama menjabat, pendidikan terakhir, dan jabatan.

Tabel 4.2 Profil Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	33	45,8
Perempuan	39	54,2
Total	72	100
Lama Menjabat		
1- 2 tahun	32	44,4
2 – 4 tahun	30	41,7
>4 tahun	10	13,9
Total	72	100
Pendidikan Terakhir		
D3	4	5,5
S1	48	66,7
S2	20	27,8
Total	72	100
Jabatan		
Eselon 3	26	36,1
Eselon 4	46	63,9
Total	72	100

Sumber : Data Primer diolah (2013)

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas terlihat bahwa jenis kelamin responden didominasi oleh kaum perempuan sebanyak 39 orang atau sebesar 54,2 % sedangkan sisanya sebanyak 33 responden atau sebesar 45,8 % berjenis kelamin laki-laki.

Jika dilihat dari lamanya menjabat, terlihat bahwa responden yang menjabat antara 1 sampai 2 tahun sebanyak 32 orang atau sebesar 44,4 %, yang menjabat 2 sampai 4 tahun sebanyak 30 orang atau sebesar 41,7% dan yang menjabat diatas 4 tahun sebanyak 10 orang atau sebesar 13%. Dari profil responden tersebut terlihat kebanyakan sudah menempati jabatannya lebih dari 1 tahun, ini berarti pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini sudah cukup lama di amanahi jabatan sekarang yang ditempatinya sehingga dianggap cukup paham dan terbiasa dengan penerapan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas responden telah berpendidikan S1 dan S2 yaitu sebanyak 48 orang atau 66,7% untuk S1 dan 20 orang atau sebesar 27,8% untuk S2. Sisanya responden mempunyai tingkat pendidikan D3 sebanyak 4 orang atau sebesar 5,5%. Ini berarti pola pikir responden sudah cukup memadai untuk memahami konsep akuntabilitas dan transparansi pengelolaan laporan keuangan.

Selanjutnya, pada Tabel 4.2 juga terlihat bahwa mayoritas responden menjabat eselon 4 yaitu sebanyak 46 orang atau sebesar 63,9 % dan yang menjabat eselon 3 sebanyak 26

orang atau sebesar 36,1%. Ini berarti responden merupakan pegawai yang cukup memadai untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

4.3 Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian dalam penelitian ini seperti kinerja, akuntabilitas, dan transparansi maka digunakan tabel statistik deskriptif yang menunjukkan angka kisaran teoritis, kisaran sesungguhnya (aktual), median, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi yang dapat dilihat dalam Tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Rentang Teoritis	Rata-rata Teoritis	Rentang Aktual	Rata-rata Aktual	Standar deviasi
Kinerja	8 – 40	24	23 – 39	29,9444	3,83787
Akuntabilitas	13 – 65	39	38 – 64	50,3611	7,04774
Transparansi	11 – 55	33	13 – 55	32,1528	11,57786

Sumber : Data Primer diolah (2013)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, jawaban responden pada masing-masing variabel terlihat memberikan informasi yang menunjukkan bahwa variabel penelitian berupa kinerja dan akuntabilitas cenderung masuk kategori tinggi. Sedangkan jika dilihat dari rata-rata aktual dibandingkan dengan nilai standar deviasi di dapatkan kesimpulan bahwa nilai rata-rata aktual seluruh variabel lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar deviasinya, hal ini berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat homogen.

Jika dilihat dari setiap variabel yang diuji dalam penelitian ini yang terdiri dari 72 responden. Variabel kinerja memiliki nilai rata-rata aktual sebesar 29,944 lebih tinggi dibanding dengan rata-rata teoritisnya yang hanya sebesar 24 dengan standar deviasi 3,83787. Variabel akuntabilitas memiliki nilai rata-rata aktual dari variabel akuntabilitas adalah sebesar 50,3611 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 39, menunjukkan rata-rata aktual lebih tinggi dari pada rata-rata teoritis dengan standar deviasi 7,04774 . Sedangkan variabel transparansi memiliki nilai rata-rata aktual sebesar 32,1528 sedikit lebih kecil dari nilai rata-rata teoritis 33 namun memiliki standar deviasi 11,57786.

4.4 Uji Kualitas Data

Untuk menguji validitas dari suatu data penelitian dapat menggunakan analisis *pearson correlation* dimana jika total dari analisis menunjukkan nilai < 0.05 maka data dikatakan valid. Hasil Pengujian validitas data dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Data

No	Variabel	Pearson Correlation	Signifikan	Keterangan
1	Kinerja	0,441- 0,725	0.000	Valid
2	Akuntabilitas	0,495- 0,838	0.000	Valid
3	Transparansi	0,831- 0,862	0.000	Valid

Sumber : Data Primer diolah (2013)

Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa variabel kinerja, akuntabilitas dan transparansi semuanya berada pada nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 ini berarti, semua variabel adalah valid.

Tingkat reliabel suatu variabel atau konstruk penelitian dapat dilihat dari hasil uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Variabel atau konstruk dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$. Semakin nilai alphanya mendekati satu maka nilai reliabilitas datanya semakin terpercaya. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.5. Dari Tabel 4.5 terlihat bahwa semua variabel yaitu kinerja, akuntabilitas dan transparansi dikatakan reliabel. Hal ini terlihat dari nilai *Cronbach Alpha* yang $> 0,60$. Sehingga tidak terjadi masalah pada uji reliabilitasnya.

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
1	Kinerja	0,745	Reliabel
2	Akuntabilitas	0,899	Reliabel
3	Transparansi	0,960	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah (2013)

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorof-Smirnov Test*. Pengujian data berdistribusi normal jika nilai *Asymp Sig (2-tailed)* yang dihasilkan lebih besar dari nilai alpha yaitu sebesar 0,05 (5 %). Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Data

Variabel	Asymp Sig (2-tailed)	Keterangan
Kinerja	0,084	Normal
Akuntabilitas	0,153	Normal
Transparansi	0,166	Normal

Sumber : Data Primer diolah (2013)

Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa semua variabel yaitu kinerja, akuntabilitas dan transparansi memiliki nilai *Asymp Sig* lebih besar dari 0,05 , sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Akuntabilitas	0,09	Bebas heterokedastisitas
Transparansi	0,06	Bebas heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer diolah (2013)

Dari Tabel 4.7 terlihat bahwa untuk semua variabel yaitu akuntabilitas dan transparansi memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.5.3 Uji Multikolinearitas

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Apabila nilai VIF lebih dari 10 dan nilai *tolerance* kurang dari 0,10 maka terjadi multikolinearitas, sebaliknya tidak terjadi multikolinearitas antara variabel apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini :

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collenarity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Akuntabilitas	0,945	1,059	Bebas Multikolinearitas
Transparansi	0,945	1,059	Bebas Multikolinearitas

Sumber : Data Primer diolah (2013)

Dari Tabel 4.8 terlihat bahwa semua variabelnya yaitu akuntabilitas dan transparansi memiliki nilai *tolerance* > 0.10 dan nilai VIF < 10, sehingga semua variabel bebas dari masalah multikolinearitas.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Pengujian Hipotesis 1 dan 2

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*regression analysis*), hasil pengujian ini dapat terlihat pada Tabel 4.10 berikut ini :

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Nilai Koefisien	t- statistik	Sig.	Kesimpulan
Akuntabilitas	0,405	15,593	0,000	Diterima
Transparansi	0,132	8,359	0,000	Diterima
R Square	0,852			
Adj R Square	0,847			
F	198,104			
Sig.	0,000			

Sumber : Data Primer diolah (2013)

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa nilai *Adjust R Square* sebesar 0,847 menunjukkan bahwa 84,7 % variabel kinerja pemerintah daerah yang dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sedangkan sisanya sebesar 15,3 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan ini. Nilai statistik F sebesar 198,104 dengan nilai signifikansi $p= 0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian layak untuk digunakan. Hasil pengujian juga menunjukkan nilai koefisien akuntabilitas pengelolaan keuangan sebesar 0,405 dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa **Hipotesis 1** yang menyatakan akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah **diterima**. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah daerah juga akan tinggi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua pada Tabel 4.10 memperlihatkan bahwa nilai koefisien transparansi pengelolaan keuangan sebesar 0,132 dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa **Hipotesis 2** yang menyatakan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah **diterima**. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat transparansi maka kinerja pemerintah daerah juga akan tinggi.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD Provinsi Bengkulu. Hal ini berarti bahwa semakin akuntabel pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan dalam SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka akan semakin meningkatkan kinerja. Akuntabilitas tinggi pada pengelolaan keuangan diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Garnita (2008), Garini (2011) dan Ismiarti (2013), bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dengan menjalankan asas akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan (*disclosure*) segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban

tersebut maka kualitas kinerja pemerintah daerah baik dari sisi financial dapat meningkat dan menjadi lebih baik guna mendorong terwujudnya *good governance*.

Bila dilihat dari sisi pemegang amanah, penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan di pemerintahan Provinsi Bengkulu telah dijalankan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ada. Sehingga Pemerintah Provinsi Bengkulu berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai tolok ukur kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan.

4.7.2 Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD Provinsi Bengkulu. Hal ini berarti bahwa semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan dalam SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu maka akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Garini (2011), Ismiarti (2013) bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Secara teoritis pemerintah harus menangani dengan baik kinerjanya dengan memperhatikan 2 aspek transparansi, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi harus seimbang, juga menyangkut kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Dengan memperluas saluran transparansi yang ada selama ini di pemerintahan Provinsi Bengkulu maka pengawasan akan lebih baik dari pemberi amanah dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah dan masyarakat sehingga tingkat pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu dapat lebih baik.

Semua kegiatan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban maupun hasil pemeriksaan dilakukan dengan terbuka dan dipublikasikan ke masyarakat melalui papan pengumuman maupun media masa yang ada di Provinsi Bengkulu. Namun tidak dapat dipungkiri ada beberapa SKPD yang belum melakukan prinsip-prinsip tersebut.

5. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan: 1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD maka akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. 2. Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat transparansi pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan semakin baik. Akan tetapi dalam penerapan transparansi, beberapa SKPD belum melakukan azas-azas transparansi secara optimal.

Implikasi penelitian ini adalah: 1. Bagi pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai institusi pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk memperhatikan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD pemerintah Provinsi Bengkulu dan akhirnya akan meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu diharapkan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. 2. Kepada pegawai atau pejabat yang ada pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang berada pada bidang akuntansi atau pembukuan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dalam peningkatan

kinerja. Peningkatan kemampuan melalui berbagai hal sehingga mampu meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik.

Keterbatasan penelitian ini adalah: 1. Jumlah sampel yang diambil hanya pada manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Bengkulu, yaitu pejabat Eselon III dan IV yang hanya pada bagian akuntansi atau bagian pembukuan, sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasi untuk organisasi lain. Penelitian ini akan menunjukkan hasil yang berbeda pada organisasi lain. 2. Kemungkinan adanya responden yang bias yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kemungkinan responden tidak menjawab secara serius dan peneliti tidak mengetahui apakah yang mengisi kuisisioner benar-benar responden yang bersangkutan. 3. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah survei melalui kuesioner. Peneliti tidak melakukan wawancara secara langsung terhadap responden dan peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas di SKPD pemerintah Provinsi Bengkulu. Sehingga kesimpulan hanya diambil berdasarkan data yang telah diambil melalui penggunaan instrumen secara tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil dan beberapa keterbatasan yang dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan adanya penambahan sampel tidak hanya dari SKPD pemerintah Provinsi Bengkulu tetapi lebih luas baik jenis SKPD-nya maupun wilayahnya sehingga jumlah sampel dapat lebih banyak. 2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan juga adanya penambahan sampel yang berasal dari masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sehingga hasil penelitian dapat lebih berimbang. 3. Penelitian selanjutnya juga hendaknya mempertimbangkan metode dalam pengambilan data, yaitu tidak hanya dengan metode survei yang menggunakan kuesioner akan tetapi juga menggunakan metode wawancara sehingga data yang diperoleh bisa lebih akurat dan juga mempertimbangkan untuk menggunakan jenis penelitian metode kombinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisaningrum. (2010). *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan*.(Online). (diakses 14 Mei 2013) tersedia di World Wide Web: <http://ovy19.wordpress.com>.
- Akbar, B. (2012). *Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah*. Artikel. Fordfoundation. Public Interest Research and Advocacy Center. Hal 1-2
- Bastian, Indra, (2010). *Akuntansi Sektor Publik.Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Coryanata, Isma. (2007). *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas. Makasar.
- Dessler, Gary. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Index
- Garini, Nadia. (2011). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas di Kota Bandung*. Skripsi. Bandung. FE UNIKOM.
- Garnita, Nita. (2008). *Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Studi Kasus Pada Balai Besar Bahan dan Barang Tekhnik*. Skripsi. Bandung. FE Univ. Widyatama.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi dan Pengendalian keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YPKN.
- _____. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harian Rakyat Bengkulu. (2013), 24 Mei. *Tata Kelola Provinsi Bengkulu Urut ke-3 Terendah se Nasional*. Metropolis, Hal. 14 dan 23.
- Ismiarti. (2013). *Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah*. Tesis. Bengkulu. Program Magister Akuntansi FE Unib.
- Krina P, Loina Lalolo. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta : Sekretariat Good Public Governance Bappenas.

- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Volume 2 Nomor 1. Mei 2006. Hal 2-4
- _____. (2004). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta,
- Maryati, Sri. 2012. *Pengaruh Kejelasan Tujuan, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Bengkulu*. Tesis. Program Pascasarjana (S2) Prodi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu. Bengkulu.
- Nasution, Saufi Iqbal. (2009). *Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD DI Pemerintah Propinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Medan. FE Universitas Sumatera Utara.
- Nuraini, Y; Titi S; Rahman, Abdul. (2012). Model Pengelolaan Keuangan Instansi Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 11 Nomor 01*.
- Pasaribu. FJ. (2011). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD*. Tesis. Medan. Program Pasca Sarjana Univ.Sumatera Utara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Tamita Utama
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007. Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: 25 Tahun 2012. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Rahmanurrasjid, Amin. (2008). *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Semarang. Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro.
- Ratih, Asri Eka. (2012). *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau*.Tesis. Medan. Program Pasca Sarjana. Univesitas Sumatera Utara.
- Sande, Peggy. (2013). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Skripsi. Padang. FE Universitas Negeri Padang.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Moxed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumarsono, S. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suparno. (2012). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kota Dumai)*. Tesis. Medan. Program Pasca Sarjana Univ.Sumatera Utara.
- Wiranto, Tatang. (2012). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik*. (online). (diakses tanggal 5 Nopember 2012). Tersedia di World Wide Web: <http://www.depkominfo.go.id>.
- Werimon, Simson, Imam Ghozali, & M. Nasir, 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.Hal 21-23.

Halaman ini sengaja dikosongkan